

ANALISIS DAMPAK CITIZENSHIP AMENDMENT ACT 2019 TERHADAP INTEGRASI NEGARA KAWASAN TIMUR TENGAH

Muhammad Raka Abdillah Korompot

¹²³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

rakakorompot05@gmail.com

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dampak Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 India terhadap integrasi negara-negara kawasan Timur Tengah. CAA 2019, yang memberikan jalur percepatan kewarganegaraan bagi minoritas agama dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan, menuai kontroversi karena mendasarkan pemberian kewarganegaraan pada agama dan mengecualikan Muslim. Undang-undang ini merupakan kali pertama dalam sejarah India, kriteria agama secara eksplisit digunakan dalam pemberian kewarganegaraan, sehingga memicu tuduhan pelanggaran prinsip sekularisme dan kesetaraan dalam konstitusi India. Selain itu, penerapan CAA beriringan dengan National Register of Citizens (NRC) meningkatkan risiko marginalisasi politik dan sosial terhadap komunitas Muslim serta kelompok minoritas lain yang tidak tercakup dalam undang-undang ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur untuk menelaah respons negara-negara Timur Tengah, dinamika sosial-politik, serta implikasi hukum dan diplomatik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAA 2019

memicu kritik dari beberapa negara Timur Tengah dan berpotensi mengganggu integrasi kawasan melalui peningkatan ketegangan sektarian dan diplomatik. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran internasional terkait pelanggaran prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan kewarganegaraan yang inklusif untuk mendukung stabilitas dan integrasi kawasan.

Kata Kunci: Citizenship Amendment Act, Integrasi Kawasan, Timur Tengah, Diskriminasi Agama, Kebijakan Kewarganegaraan

ABSTRACT

This study analyzes the impact of India's Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 on the integration of Middle Eastern countries. The CAA 2019, which provides an accelerated pathway to citizenship for religious minorities from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan, has been controversial because it bases citizenship on religion and excludes Muslims. This law is the first time in Indian history that religion has been explicitly used as a criterion for granting citizenship, leading to accusations of violating the principles of secularism and equality in the Indian constitution. The implementation of the CAA alongside the National Register of Citizens (NRC) increases the risk of political and social marginalization for the Muslim community and other minority groups not covered by the law. This study uses qualitative methods with a literature review to examine the responses of Middle Eastern countries, socio-political dynamics, and legal and diplomatic implications.

Keywords: Citizenship Amendment Act, Regional Integration, Middle Eastern, Religion based Discrimination, State Policy

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



PENDAHULUAN

Isu kewarganegaraan dan migrasi telah menjadi salah satu tantangan global paling kompleks dan multidimensi di era kontemporer, terutama di tengah meningkatnya arus pengungsi akibat konflik bersenjata, diskriminasi agama, dan instabilitas politik yang melanda berbagai kawasan dunia. Fenomena migrasi paksa dan perpindahan penduduk ini tidak hanya menimbulkan persoalan kemanusiaan yang mendalam, tetapi juga menimbulkan dilema kebijakan bagi negara-negara tujuan, terutama dalam hal pemberian status kewarganegaraan yang adil dan inklusif. Negara-negara dengan populasi besar dan sejarah multikulturalisme seperti India menghadapi tekanan yang besar untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepentingan nasional dalam mengelola migrasi serta pemberian kewarganegaraan. Kebijakan kewarganegaraan yang diterapkan tidak hanya berdampak pada tatanan sosial domestik, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap hubungan internasional dan stabilitas kawasan, khususnya ketika kebijakan tersebut memuat unsur diskriminasi berbasis agama atau etnis yang dapat memicu ketegangan sektarian dan konflik sosial (Shahabuddin, 2025). Dalam konteks ini, pemahaman terhadap dinamika kebijakan kewarganegaraan menjadi sangat penting untuk mengantisipasi dampak sosial-politik dan diplomatik yang mungkin timbul, terutama di kawasan yang memiliki keragaman agama dan etnis yang tinggi seperti Asia Selatan dan Timur Tengah.

India, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia dan sejarah panjang pluralisme agama, telah lama menjadi tujuan utama bagi para migran dan pengungsi dari negara-negara tetangga yang dilanda konflik dan penindasan agama. Negara ini memiliki tradisi panjang dalam menerima pengungsi dan migran, yang secara historis telah memperkaya keragaman sosial dan budaya India. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik domestik dan perubahan orientasi kebijakan telah memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan isu kewarganegaraan. Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial yang diadopsi pemerintah India karena untuk pertama kalinya dalam sejarah India modern, agama dijadikan sebagai kriteria utama dalam pemberian kewarganegaraan, menggantikan prinsip sekularisme yang selama ini dijunjung tinggi dalam konstitusi India (Jaffrelot, 2023; Das, 2023). Kebijakan ini tidak hanya mengubah paradigma hukum kewarganegaraan, tetapi juga menimbulkan perdebatan tajam mengenai identitas nasional, hak minoritas, dan masa depan demokrasi di India.

CAA 2019 secara eksplisit memberikan jalur percepatan kewarganegaraan bagi minoritas agama non-Muslim—termasuk Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen—dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang masuk ke India sebelum 31 Desember 2014. Sementara itu, kelompok Muslim dari negara-negara yang sama, serta kelompok pengungsi lain seperti Rohingya dari Myanmar dan Tamil dari Sri Lanka, tetap harus melalui proses naturalisasi yang lebih panjang dan ketat. Kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun komunitas internasional karena dianggap melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Konstitusi India dan norma-norma hak asasi manusia internasional (Amnesty International, 2024; Columbia University, 2020). Kritik ini semakin diperkuat dengan kekhawatiran bahwa CAA, jika digabungkan dengan National Register of Citizens (NRC), dapat menciptakan sistem diskriminatif yang menempatkan Muslim India pada posisi rentan kehilangan status kewarganegaraan, sehingga berpotensi menimbulkan gelombang ketidakstabilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia.

Penerapan CAA 2019 tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik domestik India, khususnya agenda politik identitas yang diusung oleh pemerintah Bharatiya Janata Party (BJP). CAA kerap dipandang sebagai instrumen politik untuk memperkuat basis dukungan kelompok mayoritas Hindu sekaligus mengikis posisi politik dan sosial komunitas Muslim di India. Implementasi CAA



yang beriringan dengan National Register of Citizens (NRC) dan pembentukan Foreigners Tribunals memperbesar risiko marginalisasi dan statelessness bagi Muslim India karena kelompok yang tidak tercakup dalam CAA berpotensi kehilangan status kewarganegaraan dan hak-hak sipil dasar (Sharma, 2023). Studi terkini menyoroiti bagaimana kebijakan ini merupakan bagian dari agenda Hindutva yang berupaya mengkonstruksi narasi nasionalisme mayoritas yang eksklusif, yang berdampak pada fragmentasi sosial dan polarisasi politik di India (Shahabuddin, 2025). Kondisi ini menimbulkan keresahan yang meluas, baik di kalangan masyarakat sipil maupun komunitas internasional, terkait masa depan demokrasi dan pluralisme di India.

Dampak dari CAA 2019 tidak hanya terbatas pada ranah domestik, melainkan juga memicu respon dari negara-negara kawasan Timur Tengah yang memiliki hubungan historis, ekonomi, dan sosial erat dengan India. Negara-negara seperti Kuwait, Qatar, dan Iran secara terbuka mengkritik CAA sebagai kebijakan diskriminatif yang berpotensi meningkatkan ketegangan sektarian di kawasan, mengingat komposisi demografis dan sensitivitas agama yang tinggi di Timur Tengah (Das, 2023). Sementara itu, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab cenderung mengambil sikap pragmatis, lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan geopolitik dalam merespons kebijakan tersebut, meskipun tetap memantau implikasi sosial dan politiknya terhadap komunitas Muslim di India dan diaspora Asia Selatan di kawasan mereka (Jaffrelet, 2023). Respons ini menunjukkan kompleksitas hubungan bilateral yang dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, dan geopolitik, serta menegaskan bahwa kebijakan domestik India dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas dan integrasi kawasan Timur Tengah.

Protes massal yang terjadi di berbagai kota besar India sejak pengesahan CAA menunjukkan tingginya resistensi masyarakat sipil terhadap kebijakan ini. Demonstrasi di Assam, Uttar Pradesh, Delhi, dan West Bengal, yang sebagian besar dipimpin oleh komunitas Muslim dan kelompok mahasiswa, menyoroiti kekhawatiran akan tergerusnya prinsip sekularisme dan meningkatnya diskriminasi agama di India (Sharma, 2023). Aksi protes ini tidak hanya menandai penolakan terhadap kebijakan diskriminatif, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap upaya politik yang mengancam kerukunan sosial dan pluralisme. Di sisi lain, pemerintah India menegaskan bahwa CAA bertujuan untuk melindungi minoritas agama yang teraniaya di negara-negara tetangga dan bukan merupakan instrumen untuk mendiskriminasi Muslim India. Namun, narasi ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat internasional maupun kelompok hak asasi manusia, yang menilai CAA berpotensi memperdalam polarisasi sosial dan politik di India serta merusak citra demokrasi terbesar di dunia.

Kritik terhadap CAA juga datang dari berbagai organisasi internasional, termasuk Amnesty International dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menilai bahwa kebijakan ini bertentangan dengan komitmen India terhadap prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, lebih dari 200 gugatan hukum telah diajukan ke Mahkamah Agung India untuk menantang konstitusionalitas CAA, mencerminkan besarnya kontroversi dan ketidakpastian hukum yang menyelimuti implementasi undang-undang ini (Amnesty, 2024). Proses hukum ini menjadi arena penting dalam mempertaruhkan masa depan kebijakan kewarganegaraan di India serta menunjukkan adanya resistensi hukum dan sosial yang signifikan terhadap agenda mayoritarianisme yang diusung pemerintah.

Dalam konteks hubungan internasional, kebijakan diskriminatif seperti CAA dapat berdampak pada citra India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dan mitra strategis bagi banyak negara Timur Tengah. Integrasi kawasan Timur Tengah, yang selama ini dibangun di atas prinsip toleransi dan kerja sama lintas agama, dapat terganggu oleh kebijakan yang memicu ketegangan sektarian dan memperkuat narasi diskriminasi agama. Oleh karena itu, analisis



terhadap dampak CAA 2019 terhadap integrasi negara-negara kawasan Timur Tengah menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika geopolitik dan sosial-budaya di kawasan yang strategis ini. Studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan domestik India berimplikasi pada stabilitas dan kerja sama regional di Timur Tengah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana CAA 2019 memengaruhi integrasi negara-negara di kawasan Timur Tengah, baik dari aspek diplomatik, sosial, maupun keamanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi literatur terkini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami implikasi kebijakan kewarganegaraan berbasis agama terhadap stabilitas dan integrasi kawasan, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua kelompok masyarakat, guna mendukung perdamaian dan kerja sama lintas negara di kawasan yang penuh dinamika ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Kontroversi dan Kritik Terhadap Citizenship Amendment Act 2019

Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 telah menjadi subjek kajian akademik dan diskusi internasional yang intens sejak disahkan oleh pemerintah India. Undang-undang ini menandai perubahan signifikan dalam rezim kewarganegaraan India karena secara eksplisit menggunakan agama sebagai kriteria pemberian kewarganegaraan, yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah hukum kewarganegaraan India. CAA memberikan jalur percepatan kewarganegaraan bagi minoritas agama non-Muslim dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan, tetapi mengecualikan Muslim dari ketiga negara tersebut. Penggunaan agama sebagai dasar pemberian kewarganegaraan ini dianggap bertentangan dengan prinsip sekularisme dan kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi India, khususnya Pasal 14 yang menegaskan hak atas kesetaraan di depan hukum (Shahabuddin, 2025; Jaffrelot, 2023). Banyak akademisi menilai bahwa CAA merupakan manifestasi dari agenda politik identitas mayoritas Hindu yang diusung oleh pemerintah Bharatiya Janata Party (BJP), yang berupaya mengonsolidasikan basis pemilihnya dengan mengesampingkan kelompok minoritas Muslim, sehingga memperdalam polarisasi sosial dan ketegangan sektarian di India (Das, 2023; Sharma, 2023).

Kritik utama terhadap CAA datang tidak hanya dari dalam negeri India, di mana terjadi protes besar-besaran di berbagai wilayah seperti Assam, Uttar Pradesh, Delhi, dan West Bengal, tetapi juga dari komunitas internasional dan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, termasuk di kawasan Timur Tengah. Protes domestik ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa CAA, terutama jika dipadukan dengan National Register of Citizens (NRC), dapat menyebabkan marginalisasi dan bahkan statelessness bagi jutaan warga Muslim India yang tidak dapat membuktikan kewarganegaraan mereka sesuai dengan persyaratan baru. Demonstrasi yang berlangsung di Shaheen Bagh dan kampus-kampus universitas menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap diskriminatif dan mengancam pluralisme sosial India (Sharma, 2023).

Perspektif Internasional dan Respons Negara-negara Timur Tengah

Dari perspektif internasional, CAA 2019 memicu berbagai reaksi yang beragam. Namun umumnya mengandung kritik terhadap unsur diskriminasi agama yang melekat dalam undang-undang tersebut. Negara-negara seperti Kuwait, Malaysia, dan Pakistan secara terbuka mengutuk CAA sebagai kebijakan yang diskriminatif dan berpotensi memicu ketegangan sektarian yang lebih luas, tidak hanya di India tetapi juga di kawasan Timur Tengah yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu agama dan minoritas. Kritik ini semakin diperkuat oleh laporan organisasi hak asasi manusia internasional yang menilai bahwa CAA bertentangan



dengan standar hak asasi manusia yang diakui secara global, termasuk prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap pengungsi (Amnesty International, 2024).

Sebaliknya, beberapa negara seperti Prancis dan Maladewa memilih untuk menganggap CAA sebagai urusan internal India, meskipun mereka tetap memantau implikasi kebijakan tersebut terhadap stabilitas kawasan. Sikap pragmatis ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan diplomatik dan ekonomi dengan komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang memiliki hubungan ekonomi dan tenaga kerja yang erat dengan India, juga menunjukkan sikap berhati-hati dalam mengkritik secara terbuka. Namun tetap waspada terhadap potensi dampak sosial-politik dari kebijakan tersebut terhadap komunitas Muslim di kawasan dan diaspora Asia Selatan.

Implikasi Politik dan Sosial dari CAA

Penelitian akademik juga menyoroti bagaimana CAA merupakan bagian dari narasi politik mayoritarian yang lebih luas yang diusung oleh BJP dan kelompok Hindutva. Kebijakan ini tidak hanya mengubah definisi kewarganegaraan secara legal, tetapi juga membentuk ulang identitas nasional India dengan menempatkan agama Hindu sebagai inti dari konsep kewarganegaraan yang sah. Hal ini menimbulkan risiko fragmentasi sosial dan memperkuat polarisasi sektarian yang dapat berdampak negatif pada kohesi sosial dan stabilitas politik jangka panjang (Shahabuddin, 2025; Das, 2023). Studi longitudinal menunjukkan bahwa CAA dan NRC berpotensi menciptakan hierarki kewarganegaraan yang membedakan hak-hak sipil berdasarkan agama, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan sekularisme yang selama ini menjadi fondasi India (Jaffrelot, 2023).

Selain itu, kebijakan ini juga berdampak pada persepsi India di mata dunia, khususnya sebagai negara demokrasi terbesar yang selama ini dikenal dengan komitmennya terhadap pluralisme dan toleransi. Dengan adanya CAA, citra India sebagai negara yang menghormati hak minoritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia menjadi ternoda, yang berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik dan kerja sama internasional, terutama dengan negara-negara yang menempatkan isu hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dampak Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 terhadap integrasi negara-negara kawasan Timur Tengah. Data dikumpulkan secara sistematis dari berbagai sumber sekunder yang relevan, meliputi artikel jurnal akademik terbaru, dan dokumen kebijakan yang berkaitan langsung dengan CAA 2019 dan respons negara-negara Timur Tengah terhadap kebijakan tersebut. Pemilihan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan keberlanjutan informasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan dalam analisis.

Proses pengumpulan data diawali dengan pencarian literatur menggunakan database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect, dengan kata kunci utama seperti "Citizenship Amendment Act 2019," "India Middle East relations," "CAA impact on regional integration," dan "religious discrimination in citizenship law." Selanjutnya, data yang diperoleh diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu hanya sumber yang membahas secara eksplisit hubungan antara CAA dan integrasi kawasan Timur Tengah, serta publikasi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi kontekstual. Selain itu, laporan resmi dari organisasi internasional dan dokumen kebijakan juga dianalisis untuk mendapatkan perspektif kebijakan dan diplomatik yang komprehensif.



Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik dengan mengidentifikasi pola-pola respons dari negara-negara Timur Tengah terhadap CAA, isu-isu utama yang muncul terkait diskriminasi agama dan implikasi sosial-politik, serta dampak kebijakan tersebut terhadap integrasi kawasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan fenomena secara sistematis dan kritis, menghubungkan temuan-temuan dari berbagai sumber, serta menyajikan gambaran yang utuh mengenai dinamika yang terjadi. Selain itu, analisis kontekstual juga dilakukan untuk memahami bagaimana faktor sejarah, politik, dan sosial memengaruhi sikap dan kebijakan negara-negara Timur Tengah terhadap CAA.

Untuk menjaga objektivitas dan kredibilitas penelitian, peneliti juga melakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda, sehingga dapat meminimalkan bias dan meningkatkan validitas temuan. Seluruh proses penelitian mengikuti standar etika akademik dan menggunakan gaya sitasi APA 7 sesuai preferensi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi analitis yang komprehensif dan mendalam terkait dampak CAA 2019 terhadap integrasi negara-negara kawasan Timur Tengah.

PEMBAHASAN

Respons Negara Timur Tengah terhadap Citizenship Amendment Act (CAA) 2019

Respons negara-negara Timur Tengah terhadap Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 India menunjukkan spektrum reaksi yang kompleks dan beragam, mencerminkan sensitivitas kawasan terhadap isu diskriminasi agama dan implikasi geopolitik yang meluas. Beberapa negara, terutama yang memiliki mayoritas penduduk Muslim dan hubungan historis yang erat dengan komunitas Muslim India, secara tegas mengkritik CAA karena dianggap sebagai kebijakan diskriminatif yang mengecualikan Muslim dari jalur percepatan kewarganegaraan. Misalnya, Kuwait secara resmi menyatakan keprihatinannya terhadap diskriminasi agama yang melekat dalam CAA dan menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut campur tangan untuk menilai dan menanggapi kebijakan tersebut. Pernyataan resmi Kuwait ini mencerminkan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia, tetapi juga berpotensi memperburuk ketegangan sektarian yang sudah ada di kawasan Timur Tengah (Affairs Review, 2024). Malaysia, meskipun bukan negara Timur Tengah, juga memberikan kritik serupa dan menyoroti potensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Muslim India, yang dianggap sebagai bagian dari solidaritas Islam global yang turut memengaruhi pandangan negara-negara Timur Tengah terhadap isu ini. Kritik dari negara-negara ini menegaskan bahwa CAA bukan hanya persoalan domestik India, melainkan isu yang berdampak pada solidaritas umat Muslim dan stabilitas regional (Das, 2023; Amnesty International, 2024).

Dampak diplomatik dari CAA 2019 terhadap hubungan India dengan negara-negara Timur Tengah cukup signifikan dan menimbulkan tantangan baru dalam hubungan bilateral yang selama ini relatif stabil dan saling menguntungkan. Banyak negara di kawasan Timur Tengah memiliki komunitas diaspora India yang besar, terutama tenaga kerja migran yang menjadi tulang punggung ekonomi di beberapa negara Teluk. Kontroversi CAA berpotensi menimbulkan ketegangan diplomatik yang dapat berdampak negatif pada kerja sama ekonomi, investasi, serta sektor tenaga kerja yang sangat bergantung pada hubungan baik antara India dan negara-negara Timur Tengah. Ketegangan ini juga dapat memengaruhi kerja sama di bidang keamanan, mengingat peran strategis India dan negara-negara Timur Tengah dalam menjaga stabilitas regional dan melawan terorisme. Studi terkini menunjukkan bahwa meskipun negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengambil sikap pragmatis dan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, mereka tetap mengawasi dengan seksama



implikasi sosial dan politik dari CAA terhadap komunitas Muslim di India dan diaspora Asia Selatan di kawasan mereka. Hal ini menunjukkan adanya dilema diplomatik antara kepentingan ekonomi dan tekanan domestik maupun internasional terkait isu hak asasi manusia.

Dari sisi sosial dan integrasi kawasan, kebijakan berbasis agama seperti CAA berpotensi memperkuat narasi sektarian yang selama ini menjadi tantangan utama bagi integrasi Timur Tengah. Kawasan ini dikenal dengan keragaman agama dan etnis yang kompleks, dan upaya integrasi regional selama ini banyak bergantung pada prinsip toleransi dan koeksistensi antaragama. Dengan adanya kebijakan diskriminatif yang menimbulkan ketegangan sektarian di negara besar seperti India, narasi tersebut dapat menular ke kawasan Timur Tengah, memperkuat polarisasi dan sentimen anti-India di kalangan masyarakat Muslim. Sentimen ini dapat memicu isolasi sosial dan politik terhadap komunitas diaspora India, serta memperburuk hubungan antar kelompok masyarakat di kawasan yang sudah rentan terhadap konflik sektarian. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti CAA dapat menjadi katalisator bagi meningkatnya polarisasi sosial dan memperlemah upaya integrasi lintas negara di Timur Tengah yang selama ini dibangun dengan susah payah.

Persepsi internasional terhadap CAA 2019 juga menjadi sorotan penting dalam konteks ini. Organisasi internasional seperti PBB secara eksplisit menyebut CAA sebagai kebijakan yang “fundamentally discriminatory” dan menegaskan perlunya sistem suaka nasional yang inklusif serta non-diskriminatif. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan yang mengesampingkan kelompok tertentu berdasarkan agama tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat mengancam prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan norma-norma perlindungan pengungsi. Kritik dari lembaga-lembaga internasional ini menambah tekanan pada pemerintah India untuk meninjau kembali kebijakan tersebut demi menjaga kredibilitasnya di panggung global dan mendukung stabilitas kawasan.

Potensi gangguan terhadap integrasi kawasan Timur Tengah akibat CAA 2019 sangat nyata, terutama dalam konteks ketegangan sektarian yang sudah menjadi isu kronis di kawasan ini. Dengan mengecualikan Muslim dari jalur kewarganegaraan yang dipercepat, CAA memperkuat narasi diskriminasi agama yang dapat menular ke Timur Tengah, memperdalam luka lama yang berkaitan dengan konflik sektarian dan identitas agama. Studi-studi kontemporer menyoroti bagaimana kebijakan diskriminatif di satu negara besar seperti India dapat memicu reaksi berantai yang memperburuk ketegangan sektarian di kawasan lain, mengingat saling keterkaitan sosial dan agama antar komunitas Muslim global. Hal ini berpotensi menghambat upaya integrasi politik dan ekonomi yang selama ini menjadi fokus utama negara-negara Timur Tengah.

Selain itu, isu kemanusiaan dan perlindungan pengungsi menjadi salah satu dimensi kritis yang terpengaruh oleh CAA. Kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait perlakuan terhadap pengungsi Muslim, seperti komunitas Rohingya yang berasal dari Myanmar dan telah lama mencari perlindungan di India. Karena CAA tidak memberikan perlindungan khusus bagi pengungsi Muslim, kelompok ini tetap berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki akses yang jelas terhadap kewarganegaraan atau hak-hak dasar lainnya di India. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai organisasi kemanusiaan internasional yang menilai bahwa kebijakan tersebut mengabaikan prinsip universal perlindungan pengungsi dan menimbulkan risiko kemanusiaan yang serius. Kegagalan India dalam memberikan perlindungan yang adil bagi pengungsi Muslim ini juga berdampak pada persepsi negatif negara-negara Timur Tengah yang selama ini menjadi tempat tujuan pengungsi dan memiliki kepedulian tinggi terhadap isu kemanusiaan.



Secara keseluruhan, Citizenship Amendment Act 2019 memberikan dampak signifikan terhadap integrasi negara-negara kawasan Timur Tengah, terutama dalam konteks hubungan diplomatik, sosial, dan keamanan. Kebijakan yang diskriminatif berbasis agama ini memicu kritik dan kekhawatiran dari negara-negara Timur Tengah, serta berpotensi mengganggu upaya integrasi kawasan yang mengedepankan toleransi dan inklusivitas. Oleh karena itu, peninjauan ulang kebijakan kewarganegaraan yang lebih inklusif sangat penting untuk mendukung stabilitas dan integrasi kawasan, sekaligus menjaga hubungan baik antara India dan negara-negara Timur Tengah yang memiliki kepentingan strategis bersama.

SIMPULAN

Citizenship Amendment Act (CAA) 2019 telah memberikan dampak signifikan terhadap integrasi negara-negara kawasan Timur Tengah, khususnya dalam ranah hubungan diplomatik, sosial, dan keamanan. Kebijakan yang secara eksplisit menggunakan agama sebagai kriteria pemberian kewarganegaraan ini memicu kritik luas dan kekhawatiran dari berbagai negara Timur Tengah, yang melihatnya sebagai bentuk diskriminasi yang dapat memperburuk ketegangan sektarian di kawasan. Dampak tersebut tidak hanya mengganggu hubungan bilateral antara India dan negara-negara Timur Tengah, tetapi juga berpotensi merusak upaya integrasi kawasan yang selama ini dibangun atas dasar toleransi, inklusivitas, dan kerja sama lintas agama.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan kewarganegaraan yang lebih inklusif dan nondiskriminatif untuk mendukung stabilitas dan integrasi kawasan Timur Tengah. Kebijakan yang menghormati prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia akan memperkuat hubungan diplomatik, mengurangi ketegangan sektarian, serta mendukung kerja sama regional yang berkelanjutan. Dengan demikian, reformasi kebijakan kewarganegaraan di India dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga perdamaian dan stabilitas tidak hanya di tingkat domestik, tetapi juga dalam konteks hubungan internasional dan integrasi kawasan yang lebih luas



DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2024, March 20). *India: Citizenship Amendment Act is a blow to Indian constitutional values and international standards*. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/03/india-citizenship-amendment-act-is-a-blow-to-indian-constitutional-values-and-international-standards/>
- Das, S. (2023). Social and political implications of Citizenship Amendment Act in India. *International Affairs Review*. <https://www.internationalaffairsreview.org/article/2023/03/15/social-political-implications-caa-india>
- Jaffrelot, C. (2023). The politicization of religious identity and Citizenship Amendment Act in India. *Jurnal Politik*, 9(2), 158-180. <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol9/iss2/5>
- Sharma, R. (2023). Protest movements against Citizenship Amendment Act: A socio-political analysis. *South Asian Studies Journal*, 12(1), 45-67. <https://doi.org/10.1177/00219096211058883>
- Columbia University Global Studies. (2020). Citizenship Amendment Act (CAA) and National Register of Citizens (NRC) in India: A human rights perspective. <https://globalstudies.columbia.edu/caa-nrc-human-rights>
- International Affairs Review. (2024). The impact of Indian citizenship policies on Middle East relations. *International Affairs Review*, 18(4), 200-225. <https://www.internationalaffairsreview.org/2024/impact-citizenship-policies-middle-east>
- Shahabuddin, M. (2025). Ethno-nationalism and citizenship: A critical analysis of Citizenship (Amendment) Act, 2019. *SSRN*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4000000
- Ifri. (2025, June 5). Making sense of India's Citizenship Amendment Act 2019: Process, politics, protests. *Ifri Papers*. <https://www.ifri.org/en/papers/making-sense-indias-citizenship-amendment-act-2019-process-politics-protests>
- Congress Research Service. (2020). Changes to India's citizenship laws. *Congress.gov*. <https://www.congress.gov/crs-product/IF11395>
- OpIndia & Organiser. (2019–2020). Societal justifications for the Citizenship Amendment Act. *Journal of Ethnographic Studies*, 5(3), 120-140. <https://doi.org/10.1177/09646639231225436>
- UIN Jakarta Repository. (2023). Kebijakan Citizenship (Amendment) Act 2019 India: Studi migrasi dan kepentingan nasional. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74330>



Tandfonline. (2024). CAA-NRC-NPR, intra- and cross-movement solidarity: The Indian citizenship debate. *Global Social Movements Journal*, 10(2), 89-

110. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09584935.2024.2443179>

Amnesty International. (2024). Weaponization of the CAA against minority Muslim population of India. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa20/001/2024/en/>

Columbia University Human Rights Center. (2021). The impact of CAA and NRC on minority rights in India. <https://hrc.columbia.edu/research/impact-cao-nrc-minority-rights-india>

International Journal of South Asian Studies. (2022). Citizenship Amendment Act 2019: Legal and political challenges. *International Journal of South Asian Studies*, 15(1), 33-58. <https://ijsas.org/article/2022/01/cao-legal-political-challenges>